

Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 (021) 29935678

www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) / Wakil Menteri

BUMN I / Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN

No. SK : SK-373/MBU/11/2020

Persyaratan

1. Rancangan RKAP
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
3. Usulan Key Performance Indicator (KPI) Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
4. Usulan indikator aspek operasional untuk perhitungan tingkat kesehatan BUMN
5. Surat Permohonan Persetujuan Pengesahan RKAP
6. Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
7. Dokumen persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

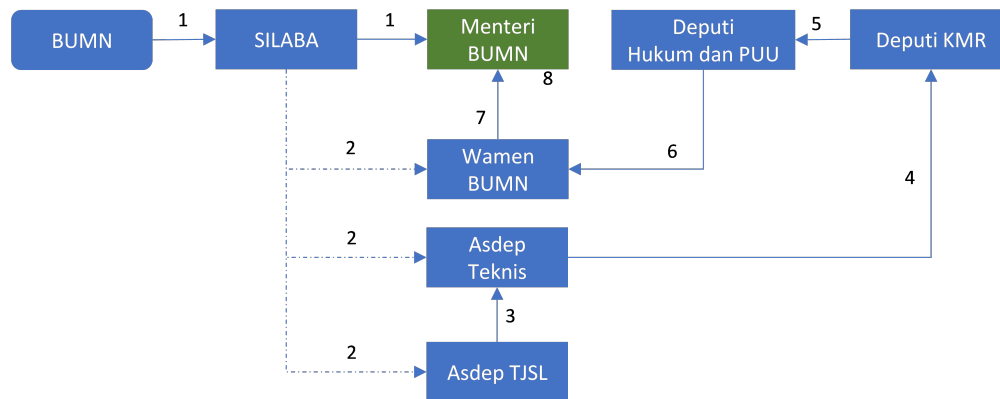
Asisten Deputy Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 (021) 29935678

www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) / Wakil Menteri
BUMN I / Asisten Deputy Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan



1. BUMN mengajukan Rancangan RKAP beserta kelengkapannya melalui portal SILABA.
2. Wakil Menteri BUMN (Wamen BUMN) melalui Asisten Deputy (Asdep) yang menangani portofolio BUMN (Asdep Teknis) dan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melakukan penyiapan bahan dan data dari portal SILABA.
3. Asdep TJSL memberikan rekomendasi keputusan usulan RUPS atas RKAP terkait TJSL BUMN.
4. Asdep Teknis melakukan analisis dan evaluasi dokumen kelengkapan, menyusun konsep Nota Dinas serta mengusulkan alternatif kebijakan, surat kuasa (SKU), serta konsep usulan alternatif keputusan RUPS.
5. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko (Deputi KMR) melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang keuangan dan manajemen risiko serta memberikan persetujuan pada alternatif kebijakan, SKU, dan konsep usulan alternatif keputusan RUPS.
6. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Deputi Hukum dan PUU) melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang hukum korporasi serta memberikan persetujuan pada alternatif kebijakan, SKU, dan konsep usulan alternatif keputusan RUPS.
7. Wamen BUMN menandatangani nota dinas dan memberikan paraf persetujuan pada kebijakan SKU dan alternatif keputusan RUPS.
8. Menteri BUMN menandatangani penetapan kebijakan SKU dan alternatif keputusan RUPS, serta menugaskan Wamen BUMN untuk melaksanakan SKU dan menyampaikan arahan pemegang saham.

Waktu Penyelesaian

Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 (021) 29935678

www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) / Wakil Menteri
BUMN I / Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

22 Hari kerja

Pengesahan RKAP BUMN dilakukan paling lambat 31 Januari pada tahun berjalan dengan ketentuan seluruh dokumen persyaratan telah diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1) Risalah Keputusan RUPS atas RKAP; 2) Keputusan Pemilik Modal atas RKAP; dan 3) Kontrak Manajemen beserta Key Performance Indicator perusahaan.

Pengaduan Layanan

Website WBS: www.wbs.bumn.go.id

Website LAPOR: www.lapor.go.id